

**EFEKTIVITAS APLIKASI SAKTI DALAM DIGITALISASI PELAPORAN
BENDAHARA PENGELUARAN DI KPPN SURAKARTA**

Farhan Taufik Dwihaika¹⁾, Rukmini²⁾

^{1,2}Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

¹E-mail: farhantdh@gmail.com

²E-mail: rukmini.stie.aas@gmail.com

Abstract

Adjustments are things that must be done by various sectors as a result of the Covid-19 pandemic, including the financial sector. Many activities that were previously carried out face-to-face have switched to digital through applications. This aims to limit physical contact to reduce the spread of the Covid-19 virus. In addition, we are currently entering the era of industry 4.0 which encourages changes in technology and information from manual to digital form or better known as digitalization. For example, activities in the financial sector that have implemented digitalization are reporting on the accountability of the expenditure treasurer. KPPN as a work unit that verifies the treasurer's accountability report every month implements the LPJ submission system to be online, utilizing various applications such as email, messages, etc. Following up on this situation, Direktorat Jenderal Perbendaharaan continues to develop the SAKTI application with the aim that it can be used by all task forces in the management and accountability of the State Budget. In 2022, the Ministry of Finance began implementing SAKTI to be used by all task forces in Indonesia. One of the SAKTI users, the Expenditure Treasurer, focuses on the SAKTI Treasurer Module in administering and compiling the Expenditure Treasurer's LPJ. The purpose of this study is to find out the use of the SAKTI application by the expenditure treasurer, the process of preparing the Expenditure Treasurer's LPJ, and the benefits and obstacles faced by KPPN Surakarta in making and reporting the Expenditure Treasurer's LPJ. The research method used is a descriptive qualitative research method with data collection using direct observation, literature studies and documentation. The results of the study show that the application of the SAKTI application to the digitization of expenditure treasurer reporting is considered effective.

Keywords : digitalisasi, efektivitas, laporan pertanggungjawaban, SAKTI

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 190/PMK.05/2012, Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, mempertanggungjawabkan, dan menatausahakan dana untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor atau unit kerja kementerian negara atau lembaga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bendahara menggunakan aplikasi SAKTI mulai

dari pencatatan transaksi hingga membuat laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

Disamping itu, digitalisasi merupakan transformasi fundamental yang melibatkan penerapan teknologi digital dalam proses bisnis dan kehidupan sehari-hari (Fonna, 2019; Jamaludin dkk., 2022). Digitalisasi sistem pelaporan keuangan mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi proses

pelaporan keuangan secara elektronik. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak, sistem basis data, dan infrastruktur jaringan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan dalam format yang lebih efisien dan tepat waktu. Namun, ada juga tantangan yang terkait dengan digitalisasi sistem pelaporan keuangan, seperti keamanan data, biaya implementasi dan pemeliharaan sistem, serta penyesuaian dengan perubahan teknologi dan regulasi yang terus berubah. Penerapan digitalisasi sistem pelaporan keuangan menjadi semakin penting dalam era di mana informasi menjadi aset strategis utama bagi perusahaan.

Diharapkan reformasi sistem pengelolaan keuangan nasional dapat mengikuti perkembangan era industri 4.0 dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi informasi. SAKTI, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membantu instansi pemerintah dalam berbagai hal seperti perencanaan anggaran, penganggaran, pengeluaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. SAKTI adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Diharapkan bahwa SAKTI akan membantu instansi pemerintah mengelola dan melaporkan keuangannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

Dengan adanya perkembangan aplikasi SAKTI, bendahara pengeluaran dapat dengan mudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap bulan melalui modul Bendahara tanpa harus datang langsung ke KPPN.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian ini agar menjawab rumusan masalah antara lain apakah penerapan penggunaan aplikasi SAKTI dalam penyampaian LPJ Bendahara dapat dikatakan efektif? dan apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SAKTI dalam penyampaian LPJ Bendahara?

2. METODE PENELITIAN

Penulis memilih metode pengumpulan data observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan

yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Pengamatan atau observasi adalah tindakan terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk merasakan dan memahami informasi tentang sebuah fenomena menggunakan pengetahuan dan konsep sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian.

Penulis kemudian memutuskan untuk menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Selain itu, penelitian deskriptif juga bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu fenomena alam atau akuntansi tanpa secara sistematis mengaitkannya dengan fenomena lain.

Penulis kemudian memutuskan untuk menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Selain itu, penelitian deskriptif juga bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu fenomena alam atau akuntansi tanpa secara sistematis mengaitkannya dengan fenomena lain.

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui survei lapangan, yang diamati, dan dicatat oleh penulis. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan pengumpulan materi dari observasi terdahulu. Penulis juga mengolah data dengan metode analisis deskriptif.

Beberapa teori indikator efektivitas diperlukan untuk penelitian ini yang bertujuan untuk menilai seberapa efektif sebuah sistem. Menurut Duncan, yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya "Efektivitas Organisasi", indikator efektivitas berikut dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas sebuah organisasi:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, pentahapan diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan akhir, baik dalam hal pencapaian bagian-bagiannya maupun dalam hal periodisasinya. Tujuan terdiri

dari beberapa faktor, seperti jangka waktu dan sasaran kongkrit.

b. Integrasi

Pengukuran seberapa baik suatu organisasi dapat bersosialisasi, mencapai konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lainnya.

c. Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Untuk mencapai tujuan ini, tolak ukur digunakan dalam proses pengadaan dan pengambilan tenaga kerja.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Berdasarkan observasi, studi kepustakaan dan pengumpulan materi yang penulis lakukan dengan membandingkan masa pengelolaan keuangan satuan kerja dalam hal penyampaian LPJ Bendahara sebelum dan sesudah memakai aplikasi SAKTI didapat berbagai perbedaan sebagai berikut:

a. Aplikasi Yang Digunakan

Sebelum menggunakan aplikasi SAKTI, bendahara satuan kerja menggunakan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker). Karakteristik pada aplikasi SAS ini sebagai berikut:

1. Berbasis *Windows/Desktop*. Aplikasi berbasis *desktop* merupakan aplikasi yang dijalankan pada masing-masing komputer atau klien. Aplikasi berbasis *desktop* harus di-*install* terlebih dahulu ke dalam komputer agar dapat digunakan;
2. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Foxpro dan *database* MySql;
3. Aplikasi bersifat *multiuser*;
4. Belum terintegrasi secara *realtime* dengan aplikasi keuangan lainnya (belum *single entry point*);
5. Modul aplikasi terdiri dari Admin, PPK, PPSPM, RPD, dan SILABI (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan);

6. Rekonsiliasi data per periode dan level satuan kerja.

7. Salah satu dari banyaknya aplikasi yang digunakan satuan kerja. Aplikasi-aplikasi tersebut ialah Aplikasi RKA-KL, Aplikasi TR PNBPN, Aplikasi Gaji (GPP), Aplikasi SAS, Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi Saiba, dan Aplikasi E-Rekon LK.

Setelah menggunakan aplikasi SAS, Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat aplikasi SAKTI yang lebih *simple*, praktis dan mudah digunakan oleh *user* karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Setiap item yang berbasis web atau online hanya dapat berfungsi jika ada jaringan atau koneksi internet. Grafis yang digunakan tidak terlalu rumit dan antarmuka dibuat seringan mungkin. Dengan menggunakan web browser dan koneksi internet, dapat berjalan di berbagai platform Sistem Operasi.
2. Dibuat dengan bahasa pemrograman Java dan *database* Oracle
3. Mendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan meliputi tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban.
4. Bersifat *single entry point*, terintegrasi dengan modul pengelolaan keuangan satker;
5. Sistem aplikasi yang menggantikan semua aplikasi keuangan *existing* yang digunakan oleh satuan kerja, sehingga dari sekian banyaknya aplikasi menjadi satu aplikasi yaitu SAKTI.

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sebelum menggunakan aplikasi SAKTI yaitu dengan menggunakan aplikasi SAS proses yang dilalui oleh bendahara sangat panjang, membutuhkan waktu dan tenaga serta harus datang ke KPPN untuk meminta tandatangan persetujuan pada LPJ Bendahara yang telah dibuat.

Bendahara melakukan prosedur sederhana untuk merekonsiliasi semua transaksi yang telah direkam dalam aplikasi SAS. Setelah semua transaksi benar dan tidak ada selisih, bendahara membuat LPJ Bendahara dan mencetak semua lampiran. Kemudian, bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing menandatangani dokumen. Setelah itu, bendahara harus meng-upload ADK LPJ yang dibuat dari aplikasi SAS ke aplikasi SPRINT setiap awal bulan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan tersebut berakhir, atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur. Selain itu, satker harus menyampaikan *hardcopy* LPJ Bendahara ke KPPN sebelum batas waktu. Jika tidak melakukannya sampai batas waktu tersebut, maka akan diberikan peringatan dalam waktu lima hari sejak dikeluarkan Surat Teguran Penyampaian LPJ.

Dalam hal LPJ Bendahara yang telah dibuat telah diproses rekonsiliasi oleh KPPN dan ternyata terdapat perbedataan data, kesalahan data, ataupun kekurangan dokumen yang dikirim maka bendahara wajib memperbaiki dan mengulang proses pembuatan LPJ Bendahara pada aplikasi dari awal apabila terdapat transaksi yang salah catat. Proses panjang ini akan sangat merepotkan bendahara karena memerlukan ketelitian pada proses rekonsiliasi internal, kebutuhan kertas yang banyak untuk mencetak, permintaan tandatangan ulang kepada pejabat yang kondisi satuan kerja berbeda-beda, dan pengiriman *hardcopy* LPJ Bendahara baik datang secara langsung ataupun cara lainnya yang membutuhkan waktu dan tenaga.

Setelah menggunakan aplikasi SAKTI, bendahara satuan kerja dapat bekerja lebih sedikit prosesnya dimana ada proses yang tidak perlu dilakukan oleh satuan kerja.

c. Jangka Waktu

Sebelum menggunakan aplikasi SAKTI yaitu dengan aplikasi SAS, proses pembuatan LPJ Bendahara dan

penyampaiannya masing-masing tergantung dari satuan kerja. Akan tetapi dapat dipastikan akan lebih lama daripada setelah menggunakan aplikasi SAKTI. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jangka waktu pembuatan dan penyampaian LPJ Bendahara diantaranya:

1. Jarak satuan kerja ke KPPN mitra kerjanya. Jarak menjadi faktor dalam hal penyampaian *hardcopy* LPJ Bendahara ataupun masalah konsultasi yang diperlukan oleh bendahara apabila ada kendala dalam pembuatan LPJ Bendahara dan/atau koreksi dari KPPN atas LPJ Bendahara yang telah dikirim, diperlukan waktu untuk sampai di KPPN. Akan sangat diuntungkan apabila satuan kerja tersebut ada pada kota/kabupaten yang sama dengan KPPN. Beda halnya dengan satuan kerja yang berbeda kota/kabupaten dengan KPPN.
2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kooperatif dalam pembuatan LPJ Bendahara karena diperlukannya proses *check and balance* serta proses penandatanganan oleh pejabat tersebut. Dalam hal pejabat yang bersangkutan sering sibuk dan seringnya dinas luar akan memerlukan waktu karena tidak dapat diwakili dan belum adanya Tanda Tangan Elektronik (TTE) seperti saat ini setelah adanya SAKTI sebagaimana saya lampirkan contoh daripada LPJ Bendahara sebelum adanya TTE dan sesudah adanya TTE.
3. Pemahaman pada bendahara pengeluaran dalam pembuatan LPJ Bendahara. Faktor ini akan dialami oleh pejabat bendahara yang baru menjabat ataupun sudah lama karena diperlukan pemahaman yang baik bagaimana cara membuat LPJ Bendahara yang benar, lampiran apa saja yang dibutuhkan, ketelitian pada saat rekonsiliasi internal, perekaman transaksi dengan benar, hingga pada saat ada masalah

perbedaan data rekonsiliasi. Apabila bendahara sudah paham maka akan lebih cepat LPJ Bendahara tersebut dibuat.

Setelah menggunakan aplikasi SAKTI, penyederhanaan pada aplikasi secara sistem dan dokumen yang dikirim walaupun masih sama persyaratannya tidak menjadi masalah pada jangka waktu. Beberapa keuntungannya daripada aplikasi SAKTI terhadap jangka waktu proses pembuatan LPJ Bendahara sebagai berikut:

1. Lebih mudah pada aplikasi SAKTI karena rekonsiliasinya akan tervalidasi sama dengan yang dilakukan oleh KPPN.
2. Pengiriman ADK LPJ Bendahara tidak ke aplikasi SPRINT sudah tidak diperlukan karena proses rekonsiliasi antara satuan kerja dengan KPPN sudah terotomatisasi di dalam aplikasi SAKTI tersebut.
3. Dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani oleh pejabat bisa dilakukan dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan tidak perlu ditandatangani basah sehingga bisa dilakukan kapan dan dimana saja.
4. Pengiriman *hardcopy* LPJ Bendahara dari satuan kerja ke KPPN sudah tidak diperlukan. Cukup *softcopy* yang dilampirkan pada aplikasi SAKTI.
5. Konsultasi dapat dilakukan dengan *virtual meeting* atau dengan pesan sehingga bisa lebih cepat terselesaikan.

Dari beberapa perbedaan pada sebelum dan sesudah adanya aplikasi SAKTI dalam penyampaian LPJ Bendahara yang dikaitkan dalam teori efektivitas pada sebuah organisasi sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Dari segi pencapaian tujuan terdapat faktor kurun waktu dan sasaran. Kurun waktu dalam penyampaian LPJ Bendahara satuan kerja menggunakan aplikasi SAKTI mengalami percepatan. Beberapa tahapan

dapat dipangkas karena adanya teknologi yang dipakai pada aplikasi SAKTI.

b. Integrasi

Adanya integrasi dari semua aplikasi yang banyak digunakan oleh satuan kerja, kini hanya cukup satu aplikasi yaitu aplikasi SAKTI dan terhubung ke semua aplikasi lain yang masih ada dan digunakan oleh satuan kerja menjadikan aplikasi SAKTI ini dinilai efektif. Bukan hanya terintegrasi pada data Kementerian Keuangan tetapi juga terintegrasi pada data diluar Kementerian Keuangan. Salah contohnya yang Kemenpan-RB pada aplikasi e-monev.bappenas.go.id.

c. Adaptasi

Adaptasi pada aplikasi SAKTI sangat cepat dirasakan oleh satuan kerja karena membuat sistem pekerjaan lebih baru, modern, dan praktis serta dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Terutama pada saat masa pandemic Covid-19, penggunaan aplikasi SAKTI memaksa satuan kerja beradaptasi dengan gaya kerja baru. Hingga kini dan kedepannya, aplikasi SAKTI akan berkembang dan mengikuti kebutuhan satuan kerja agar kerja lebih efektif dan efisien.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Apakah Penerapan penggunaan aplikasi SAKTI dalam penyampaian LPJ Bendahara dapat dikatakan efektif?

Berdasarkan pengolahan data observasi yang penulis lakukan didapatkan beberapa manfaat dari penggunaan aplikasi SAKTI dalam penyampaian LPJ Bendahara yang membuktikan seberapa efektifnya untuk organisasi dari perbandingan sebelum adanya aplikasi SAKTI dan setelah adanya aplikasi SAKTI sebagai berikut:

a. Fleksibel

Sebelum adanya SAKTI, kegiatan LPJ Bendahara dilakukan menggunakan aplikasi SAS dimana aplikasi tersebut menggunakan basis data yaitu basis komputer. Maksud dari aplikasi basis komputer yaitu bendahara harus menggunakan laptop/komputer yang telah

terpasang aplikasi tersebut dan tidak dapat menggunakan laptop/komputer yang lain. Sehingga apabila bendahara tersebut sedang dalam kondisi cuti atau perjalanan dinas dimana tidak membawa laptop/komputer yang biasa bendahara tersebut gunakan, maka dipastikan bendahara tersebut tidak bisa membuat LPJ Bendahara dan tidak dapat menyampaikan LPJ Bendahara tersebut ke KPPN.

Sebaliknya pada saat adanya aplikasi SAKTI, bendahara jadi lebih fleksibel karena aplikasi SAKTI termasuk aplikasi berbasis *web* dan *online* yang artinya dapat digunakan kapan dan dimana saja tanpa terkendala harus menggunakan *device* laptop/komputer yang biasa kita gunakan sehari-hari.

b. Efisien

Proses penyampaian LPJ Bendahara secara elektronik melalui SAKTI dapat meningkatkan efisiensi karena meminimalkan kegiatan manual dan mempercepat alur persetujuan.

c. Akurasi

Dengan menggunakan SAKTI, data yang disajikan dalam LPJ Bendahara dapat lebih akurat karena prosesnya terotomatisasi dan terintegrasi dengan sistem keuangan lainnya.

d. Transparansi

Penggunaan SAKTI dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah karena informasi yang disampaikan dapat diakses secara lebih mudah oleh pihak terkait.

e. Pemantauan Yang Lebih Baik

SAKTI memungkinkan untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap proses pengeluaran dan pendapatan, sehingga memungkinkan tindakan korektif yang cepat jika diperlukan.

f. Kepatuhan Terhadap Regulasi

SAKTI sering kali telah diintegrasikan dengan aturan dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

3.2.2 Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SAKTI dalam penyampaian LPJ Bendahara?

Penggunaan aplikasi SAKTI dalam penyampaian LPJ Bendahara dapat dikatakan efektif. Tetapi ada beberapa kendala dan tantangan yang ada dan akan menjadi bahan evaluasi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pembuat aplikasi tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas
Penggunaan SAKTI memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan koneksi internet yang stabil. Di daerah-daerah tertentu, ketersediaan infrastruktur tersebut masih menjadi kendala.
- b. Kesulitan dalam Implementasi
Implementasi SAKTI sering kali memerlukan waktu dan biaya yang signifikan. Selain itu, ada tantangan dalam mengadaptasi sistem baru dengan proses yang sudah ada di instansi pemerintah.
- c. Kesulitan Penyesuaian
Sistem SAKTI mungkin tidak selalu mudah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari berbagai instansi pemerintah yang berbeda.
- d. Keamanan Data
Penting untuk memastikan bahwa sistem SAKTI memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data sensitif dalam LPJ Bendahara dari akses yang tidak sah.
- e. Pelatihan dan Keterampilan Pengguna
Pengguna SAKTI perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan sistem tersebut agar dapat mengoptimalkan manfaatnya dengan efektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian hasil dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa Penggunaan Aplikasi SAKTI dalam Penyampaian LPJ Bendahara dinilai efektif. Banyak manfaat yang dirasakan oleh *user* sejak adanya aplikasi SAKTI antara lain hemat waktu dan tenaga dan percepatan penyampaian laporan

pertanggungjawaban bendahara. Selain itu juga meningkatkan transparansi pelaporan.

Diharapkan peningkatan aplikasi SAKTI terus ditingkatkan guna memudahkan user pengguna aplikasi di berbagai modul yang disediakan. Selain itu juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan SAKTI untuk penyampaian LPJ Bendahara. Dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan pihak terkait, dapat memperbaiki proses dan mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari implementasi SAKTI.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan jurnal ini. Terutama kepada Allah swt., istri saya Riska Ayu Yunita, kedua orang tua kami, kepada rekan seperjuangan Aulia Mayang. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan doa agar selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap apa yang kita perjuangkan bersama keluarga tercinta.

6. REFERENSI

Abdul, Hafiz Tanjung. (2014). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan*.

Afriansyah, B. (2019). *Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup*.

Aji, Becdivanto Trianjas Hutomo. (2019). *Analisis Sakti dalam Pelaporan Bendahara Pengeluaran di BBPPKS Regional III Yogyakarta*.

D. Kemenkeu, "SAKTI," 2019. [Online]

Nurhidayah, A., Nadia Putri Bremara. & Maya Widyana Dewi (2024). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2019-2022*

Publik. BPFE UGM:Yogyakarta.

Slamet,K. & Sukoasih, H. (2023). *Manajemen perbendaharaan negara. PT Bumi Aksara*.

Sugiyono. (2006). *Statistika untuk penelitian*. CV Alfabeta.

Yuliana, E. (2022). *Tinjauan Atas Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran terhadap Penggunaan Sakti di Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Riau*.

